



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV  
TAHUN SIDANG 2012-2013**

**SENIN, 13 MEI 2013**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV  
TAHUN SIDANG 2012-2013**

**SENIN, 13 MEI 2013**

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.***  
**Salam Sejahtera bagi kita semua,**

**Yang kami hormati,**

- **Para Wakil Ketua,**
- **Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPR-RI,**
- **Para Anggota DPR-RI,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali Pembukaan Masa Persidangan IV ini, pertama-tama izinkanlah Pimpinan Dewan merefleksikan dua momentum penting yang jatuh pada bulan Mei, yaitu tanggal 1 Mei adalah Hari Buruh sedunia (*May Day*) dan tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Hari buruh sedunia telah diperingati serentak di seluruh dunia dan di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa buruh di berbagai daerah dan *Alhamdulillah* semua berjalan dengan tertib, aman, tanpa aksi kekerasan.

Peringatan ini menjadi momentum mengingatkan Pemerintah untuk terus memperkuat kemauan politiknya dalam mendorong semua

pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan buruh.

Keputusan pemerintah untuk menjadikan tanggal 1 Mei menjadi hari libur nasional mulai tahun depan, perlu disambut positif karena menggambarkan demokratisasi bagi kalangan buruh Indonesia. Meski demikian, penambahan hari libur nasional diharapkan tidak akan berdampak terhadap produktivitas kerja buruh.

Tidak kalah penting adalah momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pimpinan Dewan menegaskan bahwa momentum ini harus semakin menguatkan kemauan dan tekad kita sebagai bangsa beradab dan berbudaya dalam mewujudkan visi dan misi adiluhung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Memasuki Masa Persidangan IV ini, kita bersyukur bahwa dinamika peristiwa nasional yang sifatnya multidimensional selama ini, relatif dapat dikelola secara baik, meskipun terhadap dimensi tertentu masih menuai sorotan tajam masyarakat. Seiring dengan semakin dekatnya tahapan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, intensitas suhu politik juga akan terus semakin meningkat. Mencermati situasi ini, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif, sehingga dinamika percaturan politik nasional dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan eksekusi yang merugikan bagi rakyat, bangsa dan negara. Untuk itu memasuki Masa Persidangan IV, saya mengajak kita semua bekerja

lebih keras, menjaga kepercayaan konstituen dalam melaksanakan mandat perwakilan rakyat.

Sebelum saya lanjutkan, izinkanlah Pimpinan Dewan menyampaikan pemberitahuan atas dilantikannya sejumlah anggota Dewan dalam Masa Reses melalui Pergantian Antar Waktu, yakni:

1. Sdr. H.T. Zulfikar, S.H., dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sumatera Utara III;
2. Sdr. H.A. Rahman Halid MM, dari Partai Hanura, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II;
3. Sdr. Abidin Fikri, S.H., dari Partai PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Jawa Timur VI; dan
4. Sdr. H. Ebrown Luhut, S.H., dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Banten III.

Pimpinan Dewan mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja. Diharapkan dengan bergabungnya keempat saudara kita ini dapat menambah energi baru untuk mendorong kinerja Dewan menjadi semakin baik di tahun-tahun terakhir periode keanggotaan DPR saat ini.

Pada Rapat Paripurna hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita Hon. Ross Robertson Member Parliament dari New Zealand, *President of Parliamentarians for Global Action*, Hon. Mark Pritchard *Member Parliament dari United Kingdom, board member and deputy convenor of Parliamentarians for Global Action*. Didampingi dua staf *Parliamentarians for Global Action*, Ms. Leyla Nikju dan Mr. David Donat.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Mulai hari ini sampai dengan tanggal 12 Juli 2013, Dewan memasuki Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013. Dalam masa persidangan ini, Dewan memiliki 44 hari kerja atau 61 hari kalender untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Dewan telah mengagendakan proses penetapan keanggotaan beberapa jabatan publik. Proses ini dilakukan, baik melalui mekanisme persetujuan maupun pertimbangan, antara lain keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Supervisi Bank Indonesia, Pengganti Antar-Waktu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan para calon dubes negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia.

Di samping itu, Dewan juga akan melanjutkan tugas-tugas tim pengawas DPR, antara lain terhadap kasus Bank Century, pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan terhadap pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, perlindungan TKI di luar negeri, sengketa pertanahan, dan tindak-lanjut hasil kunjungan kerja komisi-komisi DPR.

Sebelum kami menguraikan rencana kegiatan Dewan dalam Masa Persidangan IV, izinkan saya menyampaikan pemberitahuan tentang adanya surat masuk dari Presiden RI tertanggal 2 Mei No. R-15/Pres/05/2013 perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, yaitu dari Kerajaan Yordania berkedudukan di Jakarta, Republik Irak berkedudukan di Jakarta, dan Republik Mauritius berkedudukan di Kuala Lumpur. Surat tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme Dewan.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Berkaitan dengan fungsi legislasi, Pimpinan Dewan mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2013, DPR dan Pemerintah telah menetapkan 70 (tujuh puluh) RUU menjadi prioritas. Pimpinan Dewan berharap, bahwa dalam Masa Sidang IV, DPR dan Pemerintah harus lebih meningkatkan tugas dalam menuntaskan sejumlah RUU prioritas. Pimpinan Dewan mencatat, kira-kira 19 (sembilan belas) RUU akan dilanjutkan pembahasannya, karena sudah memasuki pembahasan tingkat I.

Perlu Pimpinan Dewan sampaikan, bahwa beberapa RUU, seperti RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Jaminan Produk Halal, telah mengalami perpanjangan pembahasan beberapa kali. Selain itu, sejumlah RUU prioritas lain yang menunggu penyelesaian dapat kami sebutkan di antaranya, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Desa, RUU Pilkada, dan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Sejumlah RUU prioritas dan berkaitan erat dengan kepentingan rakyat kecil yang sedang menunggu penyelesaian antara lain, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU Tabungan Perumahan Rakyat, dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Mei ini. RUU ini merupakan produk

reformasi yang memberikan ruang kepada rakyat dengan berbagai fasilitas program dan kemudahan bagi rakyat, khususnya petani. RUU ini juga merupakan upaya pemberdayaan petani untuk mencapai kesejahteraannya agar lebih baik, mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif. Sementara RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap perumahan. Sasaran dari RUU Tapera adalah, rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, rakyat yang memiliki rumah tetapi tidak layak, dan seluruh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Adapun RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sangat penting, mengingat kontribusi TKI melalui *remittance* yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Terkait RUU Pemda, Dewan mengajak Pemerintah untuk bekerja sama dalam menjabarkan lebih lanjut antara kewenangan pusat dan daerah, serta kaitan tanggung jawabnya secara jelas, terutama mengenai kewenangan yang mengatur kepentingan masyarakat di daerah. Akan halnya pembahasan RUU tentang Desa, Pimpinan Dewan berharap masyarakat untuk bersabar sehingga ketika RUU ini disahkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat desa. Harapan yang sama juga untuk proses pembahasan RUU Pilkada dan RUU Pilpres. Dewan mengajak Pemerintah untuk dapat bekerja sama lebih optimal dalam menyelesaikan agenda pembahasan kedua RUU tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi kita ke depan.

Terkait dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan mengingatkan bahwa, meski perpanjangan waktu pembahasan RUU melampaui waktu yang ditentukan oleh Tata Tertib dapat disetujui, namun bukan berarti

perpanjangan waktu pembahasan selalu menjadi pilihan. Untuk itu Pimpinan berharap, alokasi waktu yang tersedia dalam masa sidang ini dapat dioptimalkan dalam menyelesaikan sejumlah agenda RUU prioritas, tentunya dengan dorongan kuat dari pimpinan-pimpinan fraksi DPR.

Melalui forum ini pula, Pimpinan Dewan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif terhadap setiap proses pembahasan RUU, sehingga UU yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkualitas.

Harapan Pimpinan Dewan ini, juga sepatutnya menjadi perhatian Pemerintah karena sejalan dengan amanat konstitusi, kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Hal ini tidaklah berlebihan karena menurut catatan Pimpinan, bahwa dalam masa persidangan sebelumnya, DPR baru dapat menyelesaikan 6 (enam) RUU yaitu 1 (satu) RUU prioritas dan 5 (lima) RUU kumulatif terbuka.

Dalam fungsi legislasi, Pimpinan Dewan mengingatkan bahwa proses pembahasan RUU ke depan harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pengajuan sampai dengan pembahasan RUU. Hal ini penting dilakukan oleh DPR, untuk menghormati keputusan MK dalam rangka melaksanakan Konstitusi. Selanjutnya, DPR bersama dengan Pemerintah akan melakukan revisi terhadap UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2014 menjadi agenda utama DPR pada Masa Sidang IV ini. Dalam kerangka ini, DPR akan menyelenggarakan Rapat Paripurna pada tanggal 20 Mei 2013, dimana Pemerintah akan menyampaikan Keterangan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (PPKF-KEM), sebagai acuan pembahasan RAPBN 2014. Melalui forum ini, Pemerintah juga akan menetapkan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran tahun 2014 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran setiap kementerian/lembaga.

Kebijakan APBN yang akan ditetapkan, diharapkan dapat memberi ruang gerak kebijakan bagi pemerintahan baru yang akan terpilih tahun depan, untuk mengimplementasikan visi, misi dan strategi dalam membangun bangsa.

Pimpinan Dewan berharap APBN tahun 2014 pada akhirnya dapat semakin memperkuat stabilitas perekonomian nasional yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan keadilan, penciptaan lapangan kerja, dan menopang pembangunan berkesinambungan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional, APBN 2014 nantinya harus lebih berkualitas dan memberikan manfaat secara nyata dan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam masa sidang ini, Pemerintah juga akan menyampaikan laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2013. Pimpinan Dewan mencermati bahwa sejumlah persoalan umum masih terus terjadi. Fenomena yang paling mendasar adalah keterlambatan penyerapan anggaran di awal tahun dan penumpukan

penyerapan di akhir tahun. Situasi ini terjadi baik di pusat maupun daerah. Persoalan lain, masih tingginya beban subsidi di berbagai sektor dengan konsekuensi semakin sempitnya ruang gerak fiskal nasional untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pembangunan infrastruktur dan serangkaian program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum.

Memperhatikan situasi yang berkembang terkait dengan deviasi asumsi makro APBN 2013, maka dimungkinkan Pemerintah mengajukan RUU APBN-P 2013, dipercepat. Untuk itu, DPR siap membahas Rancangan APBN-P 2013.

Berkenaan dengan rapat konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR yang baru saja berlangsung, kami laporkan sehubungan dengan deviasi asumsi makro-ekonomi, sebagaimana yang dinyatakan dalam APBN 2013. Direncanakan, Presiden/Pemerintah akan menyampaikan usulan APBN-Perubahan 2013, besok pagi tanggal 14 Mei 2013, dengan harapan pembahasan ini selesai pada awal Juni 2013.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada pelaksanaan fungsi pengawasan, Pimpinan Dewan mencermati beberapa hal penting. Dalam kerangka tim kerja pengawas kasus Bank Century, isu penting terkait dengan upaya Tim dalam melakukan klarifikasi atas keberadaan *asset recovery* melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance*. Selain itu, Dewan akan mengagendakan kembali Rapat Dengar Pendapat Umum dengan unsur pimpinan Bank

Indonesia (BI), mantan direksi dan komisaris Bank Century, dan pihak lain yang terkait, yang tertunda pada masa sidang yang lalu.

Hal lain yang tidak kalah penting dan menjadi agenda Alat Kelengkapan Dewan adalah penanganan dan tindak lanjut terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat atas serangkaian isu, peristiwa atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat secara umum. Pengaduan masyarakat telah disampaikan, baik melalui surat maupun secara langsung melalui Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi maupun Pimpinan-Pimpinan Komisi. Persoalan upah buruh, tenaga kerja alih daya, jaminan sosial pekerja, perlindungan hukum, sarana dan prasarana pendidikan, masalah pertanahan, adalah beberapa isu yang patut mendapatkan perhatian kita bersama. Pimpinan Dewan berharap, sebagai wakil rakyat, kita harus lebih responsif terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada lembaga kita.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Selama masa reses, serangkaian peristiwa dan persoalan yang berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengundang perhatian kita. Pimpinan Dewan, mencermati sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat TNI, Polri, dan antar-kelompok masyarakat, termasuk baru-baru ini penumpasan terhadap jaringan terorisme oleh Aparat Kepolisian. Jaringan terorisme, sampai saat ini belum juga dapat dituntaskan, walaupun penumpasan terus dilakukan oleh Densus 88. Terakhir, penyergapan terhadap 24 terduga teroris di lima lokasi berbeda, 7 diantaranya tertembak mati.

Kita apresiasi langkah aparat dalam penumpasan ini, namun kita meminta agar Densus 88 melakukan tindakan dengan profesional, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kepada seluruh masyarakat, diminta untuk waspada terhadap gerak-gerik para terduga teroris, dalam rangka memberikan dukungan dan kerjasama dengan aparat.

Peristiwa bentrok massa, terakhir terjadi antara warga masyarakat Musi Rawas dan aparat, berkaitan dengan usulan pemekaran daerah Musi Rawas Utara. Meninggalnya empat warga Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan luka kritis beberapa aparat, patut disesalkan. Penanganan unjuk rasa oleh aparat Kepolisian dianggap tidak tepat, sehingga menimbulkan korban jiwa. Bentrokan ini berlanjut dengan pembakaran Polsek dan mobil polisi oleh massa. Perusakan aset negara ini, tentu sangat merugikan kita semua.

Pengesahan pemekaran daerah Musi Rawas Utara belum dapat dilakukan, karena terkendala pada pemenuhan persyaratan, terutama mengenai batas wilayah. Kita harus berpedoman pada PP. No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Otonom Baru. Pemekaran harus berbasis kesiapan warga, juga kesiapan pemerintahan daerah yang akan dimekarkan, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai pemekaran daerah yang diinginkan oleh masyarakat, dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang sempit dan kurang disosialisasikan oleh pemerintah daerah setempat.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Terkait dengan permasalahan tahapan Pemilu, kini partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014 sudah menyerahkan Daftar Calon Sementara (DCS) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan hasil penetapan DCS, 90% Anggota DPR periode sekarang mencalonkan diri kembali, baik yang masih menggunakan bendera partai yang sama maupun yang berpindah ke partai lain. Pimpinan Dewan sangat menaruh harapan, bahwa konstelasi seperti ini tidak mengganggu ritme kerja setiap anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kerangka representasi rakyat.

Berkaitan dengan terjadinya duplikasi nama bakal calon legislatif dalam beberapa Daerah Pemilihan atau yang tercantum tidak hanya di satu partai politik, Pimpinan Dewan menegaskan bahwa hal tersebut harus segera dikoreksi. Dewan mendorong KPU bekerja secara cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu. Selain itu, Dewan mengingatkan agar seluruh kebijakan KPU harus senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap isu penegakan hukum dan penanganan beberapa kasus korupsi, Dewan mendorong para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara tegas dan profesional. Dewan mengingatkan perlunya komitmen bersama seluruh lembaga penegak hukum, untuk menjaga keadilan dan kewibawaan hukum sebagaimana yang didambakan masyarakat.

Tindakan penolakan eksekusi yang dilakukan oleh terpidana dalam kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, turut memperburuk citra penegakan hukum di mata masyarakat. Kasus ini

menjadi pembelajaran penting bagi aparat penegak hukum, untuk konsisten dan taat pada ketentuan hukum acara. Selain itu, perlu ketelitian dan kehati-hatian para hakim agar tidak terjadi kasus kesalahan administrasi, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka khususnya menyangkut isu tenggat waktu berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan, dan skema kompensasi bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat miskin. Dewan berpendapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Pimpinan Dewan mencermati, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp. 297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN kita. Konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui, diperkirakan mencapai 48-56 juta kiloliter. Hal ini akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam UU. Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Sehubungan dengan itu, Dewan mengingatkan Pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan.

Hasil penghematan subsidi BBM harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan

sumber energi, khususnya sumber energi terbarukan. Pimpinan Dewan memandang bahwa pilihan ini menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional ke depan. Gejolak sosial akibat keterlambatan pasokan premium di sejumlah wilayah beberapa waktu yang lalu, dan kekurangan pasokan solar baru-baru ini, cukup memberikan pelajaran penting, bahwa krisis energi pada akhirnya berdampak pada isu ketahanan energi dan mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional.

Hal lain yang menjadi keprihatinan Dewan adalah kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang akan berdampak pada inflasi. Meningkatnya inflasi akan berdampak pada semakin tidak terjangkaunya harga pangan. Untuk itu, seluruh program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang telah dialokasikan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang benar dan tepat sasaran.

Pada kesempatan ini, Dewan mendesak Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar-instansi, mengantisipasi dan melakukan pengawasan ke pasar, sehingga dapat menghitung jumlah stok pangan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Selain masalah bidang politik-keamanan dan ekonomi, permasalahan sosial juga tidak luput dari perhatian Dewan. Bahkan pada Masa Reses, Komisi X mengundang Mendikbud untuk membahas permasalahan Ujian Nasional (UN) tahun 2013.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pendidikan menjadi instrumen yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kesempatan ini, Pimpinan Dewan ingin merefleksikan kembali makna Hari Pendidikan Nasional, dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional selama ini termasuk evaluasi pelaksanaan UN tahun 2013.

Dewan memandang bahwa Pelaksanaan UN tahun 2013 menjadi salah satu catatan buruk dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam kesempatan Rapat Kerja Dewan dengan Pemerintah, Dewan menyesalkan pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat yang tidak dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan dan dampak psikologis bagi peserta ujian.

Oleh karena itu, Dewan sepakat dengan Pemerintah agar hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk perguruan tinggi negeri, perlu dipertimbangkan melalui kajian mendalam. Dewan juga mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Segera menyelesaikan investigasi proses pelaksanaan pengadaan naskah UN tahun 2013 dan memberikan sanksi serta menyerahkan hasilnya secara resmi kepada Komisi X.

Permasalahan lain terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Meskipun mendapat banyak kritikan, Kurikulum 2013 tetap akan dilaksanakan pada bulan Juli 2013 secara terbatas dan bertahap. Untuk jenjang Sekolah Dasar, target awal yang semula 30%,

diturunkan menjadi 5%, 7% untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan 100% untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam kerangka ini, Pimpinan Dewan mendorong Komisi X untuk memperkuat pengawasannya.

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Upah atau gaji merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Oleh karena itu, kebijakan tentang upah yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan pekerja harus terus ditingkatkan, sesuai komitmen yang selalu disampaikan oleh Dewan kepada Pemerintah. Dalam kaitan itulah, Dewan merasa perlu untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Tenaga Alih Daya untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Panja Alih Daya yang sedang dalam proses pembentukan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan praktek tenaga alih daya. Dalam kaitan ini, Dewan menaruh perhatian dan keprihatinan atas terjadinya penyekapan dan pengabaian hak-hak terhadap buruh pabrik di Tangerang baru-baru ini. Kasus ini diharapkan akan menjadi salah satu fokus bagi Komisi IX dalam rapat-rapat kerja bersama Pemerintah.

Masalah sosial lain yang mendapat perhatian Dewan adalah upaya penanganan terhadap beberapa bencana alam yang telah terjadi di tanah air, yang sampai saat ini masih saja terjadi. Bencana banjir, tanah longsor telah merusak fasilitas umum dan ratusan rumah penduduk, dan juga telah menimbulkan korban jiwa.

Pimpinan Dewan meminta Pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dibentuk, sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Langkah ini diperlukan dalam rangka merespon dan melakukan segala tindakan cepat dan tepat dalam mitigasi bencana alam.

### **Anggota Dewan Yang Terhormat,**

Dalam bidang internasional, Pimpinan Dewan mencermati hasil KTT ASEAN ke-22 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam baru-baru ini. Dewan melihat, bahwa upaya mewujudkan komunitas ekonomi ASEAN telah mencapai kemajuan. Dalam masalah ini, Dewan mengingatkan Pemerintah, bahwa terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN pada akhirnya harus didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, Dewan mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai terkait dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi kita dan memastikan bahwa keberadaan komunitas ekonomi ASEAN harus bermanfaat bagi kepentingan nasional.

Dalam masalah keamanan kawasan, Pimpinan Dewan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam, karena KTT ASEAN belum mampu mendorong penyelesaian sengketa di wilayah Laut Cina Selatan. Kita berharap, bahwa Cina bersedia memulai pembicaraan mengenai pakta non-agresi sebagaimana tertuang dalam *code of conduct*. Dewan juga mendorong Pemerintah dan ASEAN untuk meningkatkan diplomasi dalam masalah ini karena wilayah yang

dipersengketan tersebut merupakan jalur pelayaran bebas internasional.

Dalam kesempatan ini, Dewan mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Kita berharap, hubungan persahabatan kedua negara akan semakin baik.

Terkait dengan merebaknya kampanye separatisme dan anti-Indonesia di luar negeri, Dewan mengingatkan Pemerintah agar hal ini diperhatikan, karena taruhannya adalah teritorial dan NKRI. Sebagai konsekuensinya, Kementerian Luar Negeri yang merupakan ujung tombak diplomasi luar negeri, harus meningkatkan kualitas kinerja diplomatnya, agar isu yang menyudutkan kepentingan nasional tidak terulang kembali.

Di bidang diplomasi parlemen, DPR telah menerima kunjungan Delegasi Parlemen India, Parlemen Australia, Wakil Perdana Menteri Hongaria, dan Grup Kerjasama Parlemen Negara-Negara Sahabat ke DPR-RI.

Delegasi DPR-RI yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, juga telah melakukan kunjungan muhibah ke beberapa negara sahabat, antara lain ke Azerbaijan pada pertengahan April. Kunjungan tersebut telah mampu meningkatkan komunikasi kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Bahkan dalam kesempatan berdialog dengan Ketua Milli Mejlis Republik Azerbaijan, Delegasi DPR-RI memberikan dukungan langsung terhadap persoalan strategis Republik Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh dan isu tragedi Khojali.

Delegasi muhibah yang dipimpin Ketua DPR, juga telah melakukan kunjungan ke Kerajaan Denmark, Republik Lithuania dan Republik

Belarus. Kunjungan diarahkan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan diplomasi parlemen bagi kedua negara dan kedua bangsa, terutama dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi ke tingkat yang lebih strategis dan erat, dari kondisi kerjasama ekonomi bilateral saat ini. Juga kerjasama di bidang pendidikan perlu dilakukan, antara lain peningkatan jumlah beasiswa, yang akan turut menumbuhkan modalitas kedekatan yang tangguh di antara kedua negara.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Demikianlah hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun Sidang 2012-2013. Pimpinan Dewan mengajak seluruh Anggota Dewan, untuk bersungguh-sungguh mendarmabhaktikan tugas dan fungsi kita bagi bangsa dan negara pada tahun-tahun akhir masa bhakti kita. Kerja keras harus kita wujudkan dalam memenuhi amanat yang dipercayakan rakyat kepada para anggota Dewan. Semoga langkah kita diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamuálaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, 13 Mei 2013  
**KETUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. Marzuki Alie**